

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)**



Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

KOMARIYAH
B 200171218

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)**

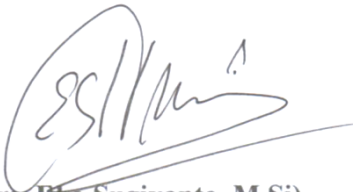
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

KOMARIYAH
B 200171218

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing



(Drs. Eko Sugiyanto, M.Si)

NIDN: 0628055901

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)

Yang ditulis oleh :

KOMARIYAH

B 200171218

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 22 Agustus 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Dr. Fatchan Ahyani, S.E, M.Si
(Anggota 1 Dewan Penguji)

()

3. Dra. Rina Trisnawati, M.Si, Ak, Ph.D
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta


Dr. Syamsudin, M.M
NIDN: 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Agustus 2019

Penulis



KOMARIYAH

B 200171218

**ALISIS RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2014-2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan statistik deskriptif. Data yang diolah adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2017 yang didapatkan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Magelang. Analisis yang digunakan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah adalah dengan menghitung Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasinya masih kurang. Kemudian di lihat dari pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Kabupaten Magelang berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Rasio Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Magelang terbilang sangat efektif dan efisien.

Kata kunci: Analisis Rasio Keuangan APBD, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract

This study aims to assess the Financial Performance of the Government of Magelang Regency by using the Financial Ratio Analysis of the Realization of the Regional Budget Revenues and Expenditures of Magelang Regency 2014-2017. The type of research used in this research is case study research with descriptive statistical approach. The data processed is the 2014-2017 Budget Year Realization and Regional Budget Realization Report obtained from the Revenue Agency, Regional Financial and Asset Management (BPPKAD) of the Government of Magelang Regency. The analysis used to analyze the Regional Financial Performance is to calculate the Degree of Decentralization Ratio, Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Expenditure Harmony Ratio, and Expenditure Efficiency Ratio. Based on the results of calculations and analysis of Regional Financial Performance it can be concluded, that the Capacity of the Regional Government of Magelang Regency in carrying out the implementation of decentralization is still lacking. Then seen from the pattern of relations the level of regional independence is in the instructive criteria. The independence of the

Government of Magelang Regency is in a very low financial capacity to meet the funding needs for the implementation of government tasks, development, and community social services. The Regional Expenditure Harmony Ratio generally shows that most of the regional expenditure funds are allocated for Operational Expenditures, and only a few percent is allocated for Capital Expenditures. Based on the results of calculations and analysis of Regional Financial Performance, it can be concluded that the level of effectiveness and efficiency in the financial management of the Magelang Regency is fairly effective and efficient.

Keywords: APBD Financial Ratio Analysis, Local Government Financial Performance.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan (Daling, Marchelino. 2013).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Fidelius, 2013).

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Fidelius, 2013).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (Pramono, Joko. 2014) :

- 1) Akuntabilitas
- 2) Manajemen
- 3) Transparansi
- 4) Keseimbangan antargenerasi
- 5) Evaluasi kinerja.

Penilaian kinerja dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Halim, 2007 : 230) :

- 1) Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

- 4) Kontribusi masing-masing sumber pendapaan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Joko Pramono (2014) Penggunaan analisis rasio keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya Pemerintah Daerah belum banyak dilakukan, tidak seperti untuk sektor privat yang sudah sering dilakukan. Hal tersebut dikarenakan :

- 1) Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi Pemerintah Daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi yang bersifat privat.
- 2) Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang selama tahun 2014-2017 dan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangannya selama tahun 2014-2017.

1.1 Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang di inginkan oleh prinsipal (dalam hal ini

terjadi pendelegasian wewenang). Lupia dan McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Abdul Halim dan Syukriy Abdullah 2010 dalam Olivia, Bella Julyanti, 2017).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laoran keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintah baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah (Himmah Bandariy 2011 dalam Olivia, Bella Julyanti, 2017).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2016:13). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Analisis Laporan Keuangan

Tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan untuk pembuatan keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan dan bagaimana mengevaluasi laporan keuangan (Mahmudi, 2016).

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis.

a. Analisis Pendapatan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Melalui Laporan Realisasi Anggaran, analisis pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan
- 2) Menghitung pertumbuhan pendapatan daerah, meliputi :
 - a) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
 - b) Pertumbuhan Pajak Daerah
 - c) Pertumbuhan Retribusi Daerah
 - d) Pertumbuhan Pendapatan Transfer
- 3) Menghitung rasio keuangan, meliputi :
 - a) Rasio Kemandirian Daerah
 - b) Rasio Ketergantungan Daerah
 - c) Derajat Desentralisasi
 - d) Rasio Efektivitas PAD

- e) Rasio Efisiensi PAD
 - f) Rasio Efektivitas Pajak Daerah
 - g) Rasio Efisiensi Pajak Daerah
 - h) Derajat Kontribusi BUMD
 - i) *Debt Service Coverage Ratio*
 - j) Rasio Utang terhadap Pendapatan
- 4) Menilai potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan, meliputi :
- a) Potensi pajak daerah
 - b) Potensi retribusi daerah
- b. Analisis Belanja

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, analisis belanja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Analisis Varians Belanja
- b) Analisis Pertumbuhan Belanja
- c) Analisis Keserasian Belanja
- d) Rasio Efisiensi Belanja
- e) Rasio Belanja terhadap PDRB

Penelitian Terdahulu

Marchelino Daling (2013) melakukan penelitian dengan judul analisis kinerja realisasi anggaran Ppendapatan dan belanja pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja realisasi APBD pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa kinerja pendapatan dari pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara belum cukup baik serta kinerja belanja dari pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara sudah baik. Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama menganalisis kinerja APBD. Perbedaannya adalah pada objek penelitian.

Fidelius (2013) melakukan penelitian dengan judul analisis rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Manado. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Manado berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan masih sangat rendah yang berarti bahwa kontribusi PAD masih sangat kecil dalam APBD serta campur tangan pemerintah pusat masih sangat dominan. Tetapi meskipun tergolong sangat rendah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti bahwa pemerintah Kota Manado telah berusaha untuk mandiri. Berdasarkan analisis rasio efektifitas kinerja pengelolaan keuangan Kota Manado sudah cukup efektif. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada teori yang digunakan, dimana teori yang digunakan adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah agar keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menggunakan beberapa rasio dalam menganalisis APBD yang ada di pemerintah Kabupaten Magelang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fidelius menggunakan Rasio Aktivitas, Rasio Pengelolaan Belanja dan Rasio Pertumbuhan.

Joko Pramono (2014) melakukan penelitian dengan judul analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian. Kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang sudah baik adalah pada aspek efisiensi, efektivitas, pertumbuhan dan kemampuan membayar pinjaman. Kinerja keuangan dari Pemkot Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 ditinjau dari aspek pengelolaan pendapatan asli daerahnya sudah sangat efektif dan efisien. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada teori yang digunakan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis tidak menggunakan Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman.

2 METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Metode studi kasus (*case study*) adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, dimana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas (Yin, 1984a: 1984b, dalam Robert K. Yin, 2006: 18 dalam Muhibtari, 2014). Studi kasus dibatasi pada bukti kuantitatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan hasil perhitungan dan grafik Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2014-2017. Kemudian dari grafik tersebut ditarik kesimpulan berkenaan dengan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Populasi dan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014-2017, yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Magelang .

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014-2017, yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Magelang.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat historis, yakni data sekunder berupa dokumentasi dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014-2017, yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Magelang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Patran, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan (Jonathan Sarwono, 2006: 138 dalam Muhibtari, 2014).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini antara lain :

- a. Menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang diperoleh dengan membuat tabel.
- b. Membuat grafik dari hasil perhitungan rasio keuangan dari setiap periode.
- c. Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio keuangan atau dengan melihat grafiknya.

Dalam menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2014-2017, rumus-rumus yang digunakan antara lain:

a) Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi

kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Tabel 3.1 Kriteria Derajat Desentralisasi

Persentase (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi
00,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM, 1991, dalam I Dewa Gde Bisma Dan Hery Susanto, 2010

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

b) Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Tabel 3.2 Nilai Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipasif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2001 dalam Rahmatina, 2011.

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

- b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\% \quad (2)$$

c) Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi/rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil. Sampai saat ini belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja operasi/rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Abdul Halim, 2012 dalam Pramono, 2014). Selanjutnya rasio keserasian dapat di formulasikan sebagai berikut :

1) Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Operasi thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \quad (3)$$

2) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 5-20%. Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \quad (4)$$

d) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Nilai Efektivitas PAD

Kriteria	Persentase (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90-99%
Kurang Efektif	75-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2016)

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (5)$$

e) Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Hanya dapat membandingkan tahun ini belanja pemerintah daerah relatif efisien dari tahun sebelumnya. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \quad (6)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang

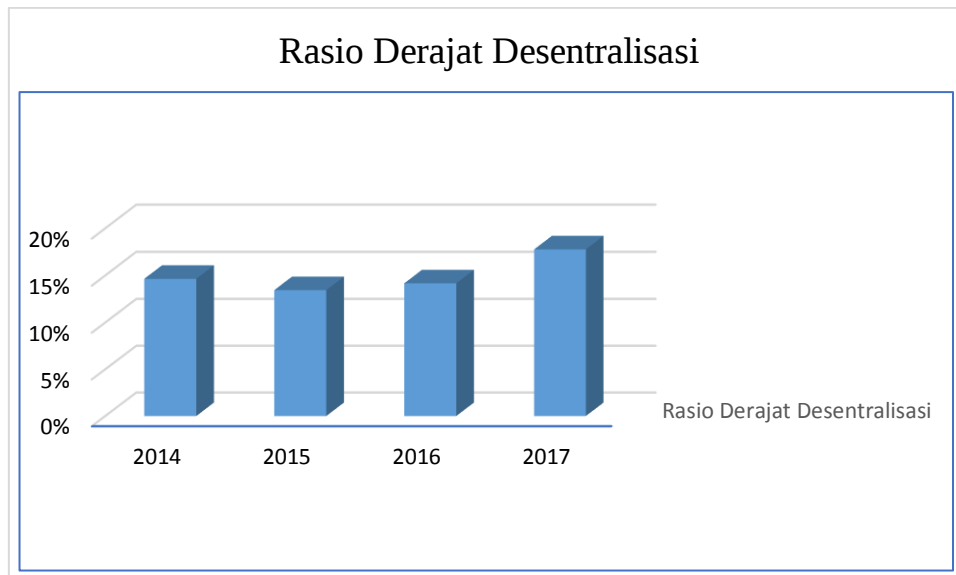
1) Rasio Derajat Desentralisasi

Berdasarkan hasil perhitungan dari data Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017, Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2017 (Dalam Rupiah)

TAHUN	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derejat Desentralisasi	Kriteria Derajat Desentralisasi
2014	242.448.677.267	1.655.674.485.031	15%	Kurang
2015	261.569.091.783	1.945.955.251.171	13%	Kurang
2016	288.485.678.128	2.036.310.089.428	14%	Kurang
2017	403.561.238.310	2.271.336.015.858	18%	Kurang
Rata-rata			15%	

Sumber: Data Sekunder Diolah



Gambar 4.1 Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dan grafik, rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 sebesar 15%. Menurut Kriteria Derajat Desentralisasi, tingkat Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Magelang tergolong kurang. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam menopang pendapatan daerah, serta peran Pendapatan Asli Daerah atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri kurang dari 20%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.

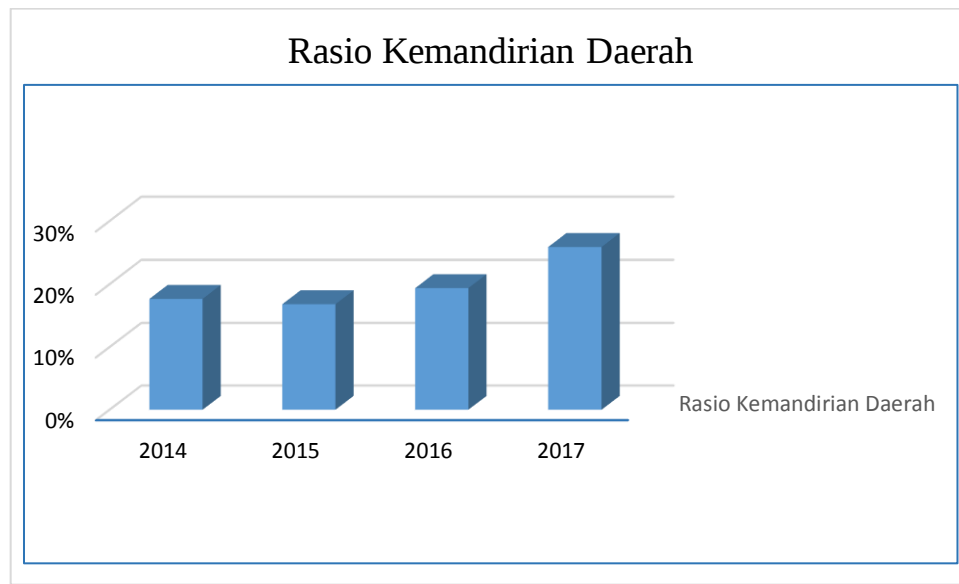
2) Rasio Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan dari data Pendapatan Asli Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017, Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 (Dalam Rupiah)

TAHUN	PAD	Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman	Rasio Kemandirian Daerah	Kriteria Kemandirian Daerah
2014	242.448.677.267	1.371.854.523.157	18%	Rendah Sekali/Instruktif
2015	261.569.091.783	1.544.784.342.466	17%	Rendah Sekali/Instruktif
2016	288.485.678.128	1.488.497.446.639	19%	Rendah Sekali/Instruktif
2017	403.561.238.310	1.558.715.495.873	26%	Rendah/Konsultatif
Rata-rata			20%	

Sumber: Data Sekunder Diolah



Gambar 4.2 Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dan grafik, rata-rata Rasio Kemandirian Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 sebesar 20%. Menurut Kategori Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah yang dituliskan oleh Halim (2001), Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tergolong rendah sekali, sehingga masuk ke dalam kategori pola hubungan instruktif yaitu berkisar antara 0%-20% selama 3 tahun berturut-turut, yaitu dari 2014-2016. Namun di tahun 2017 tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Magelang tergolong rendah, sehingga masuk ke dalam kategori pola hubungan konsultatif yaitu berkisar antara 20%-50%. Dalam pola hubungan instruktif peran Pemerintah Pusat lebih dominan terhadap kemandirian Pemerintah Daerah. Sedangkan pola hubungan konsultatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang masih sangat bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang masih belum optimal dalam menggali potensi daerahnya.

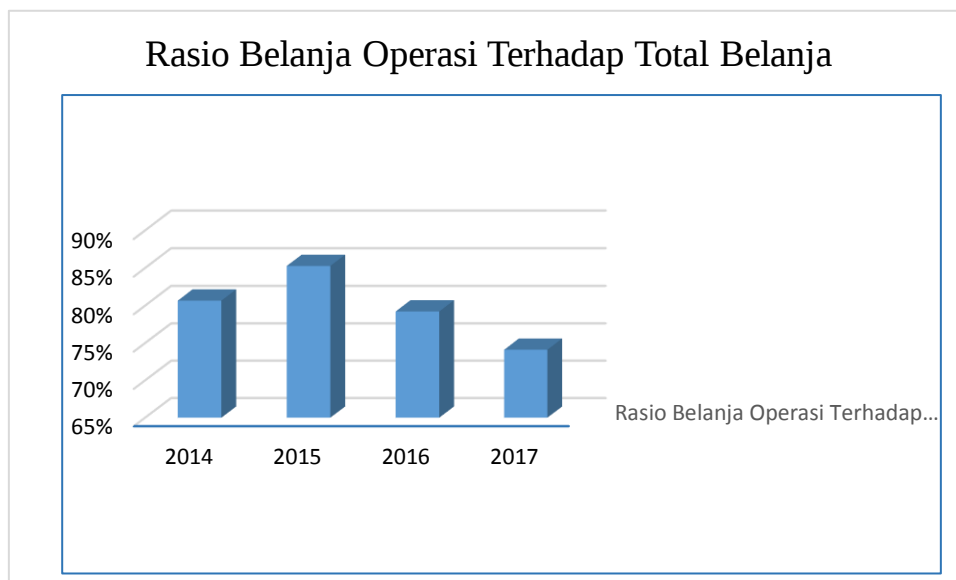
3) Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Berdasarkan hasil perhitungan dari data Realisasi Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017, Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 (Dalam Rupiah)

TAHUN	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
2014	1.335.134.537.057	1.655.060.222.422	81%
2015	1.477.025.156.554	1.732.185.946.665	85%
2016	1.353.860.231.558	1.708.801.717.141	79%
2017	1.450.952.672.642	1.957.966.285.066	74%
Rata-rata			80%

Sumber: Data Sekunder Diolah



Gambar 4.3 Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dan grafik, rata-rata Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 sebesar 80%. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang masih digunakan untuk kebutuhan belanja operasi.

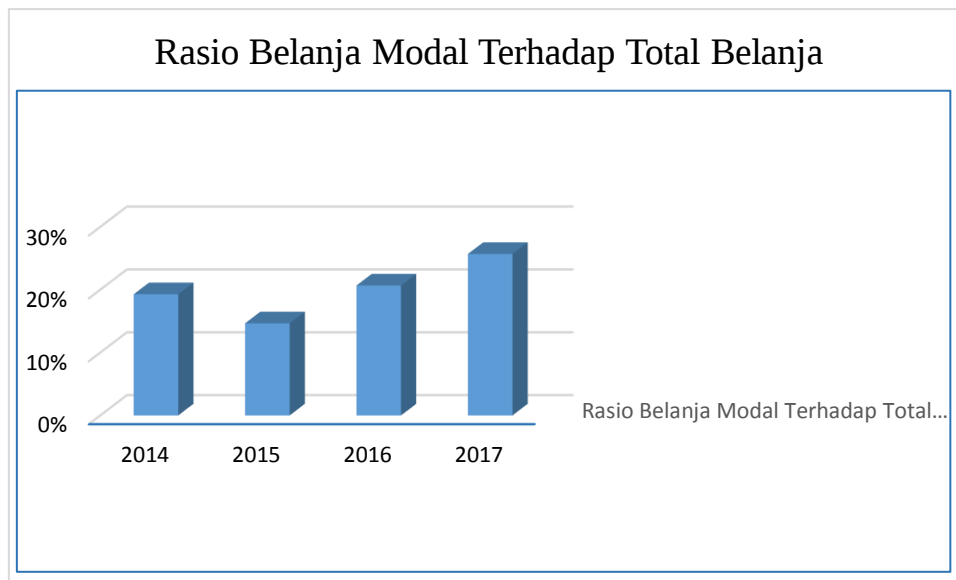
4) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Berdasarkan hasil perhitungan dari data Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017, Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 (Dalam Rupiah)

TAHUN	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
2014	319.022.187.365	1.655.060.222.422	19%
2015	253.851.809.161	1.732.185.946.665	15%
2016	353.167.692.583	1.708.801.717.141	21%
2017	502.862.222.437	1.957.966.285.066	26%
Rata-rata			20%

Sumber: Data Sekunder Diolah



Gambar 4.4 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dan grafik, rata-rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 Rasio sebesar 20%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah berkisar antara 5-20%. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi.

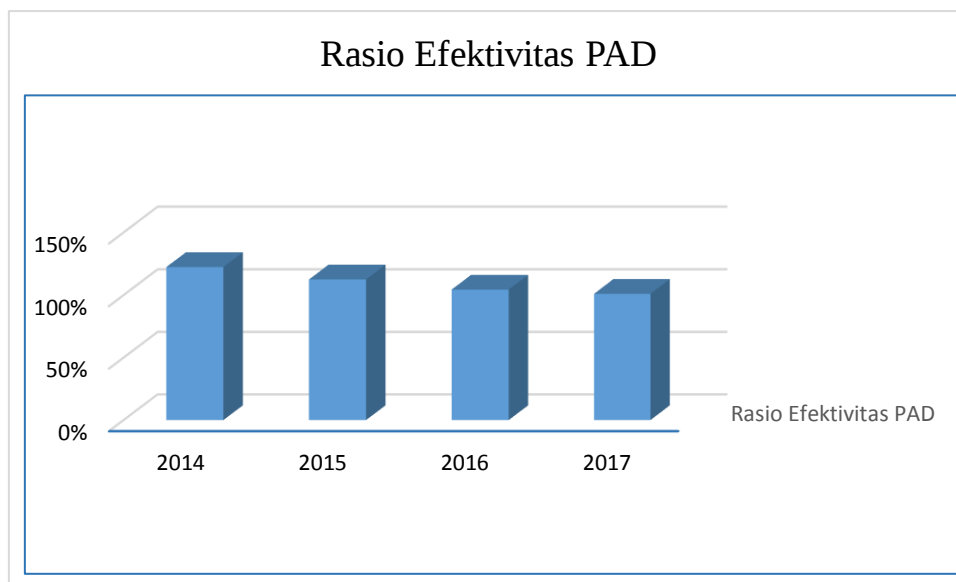
5) Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil perhitungan dari data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017, Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017
(Dalam Rupiah)

TAHUN	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas PAD	Kriteria Efektivitas PAD
2014	242.448.677.267	198.117.604.076	122%	Sangat Efektif
2015	261.569.091.783	232.532.835.584	112%	Sangat Efektif
2016	288.485.678.128	276.334.438.862	104%	Sangat Efektif
2017	403.561.238.310	399.425.826.000	101%	Sangat Efektif
Rata-rata			110%	

Sumber: Data Sekunder Diolah



Gambar 4.5 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dan grafik, rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 sebesar 110%. Menurut Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang dituliskan oleh Mahmudi (2016), Tingkat Efektivitas PAD Kabupaten Magelang tergolong sangat efektif yang berkisar lebih dari 100% selama 4 tahun berturut-turut, yaitu dari 2014-2017. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

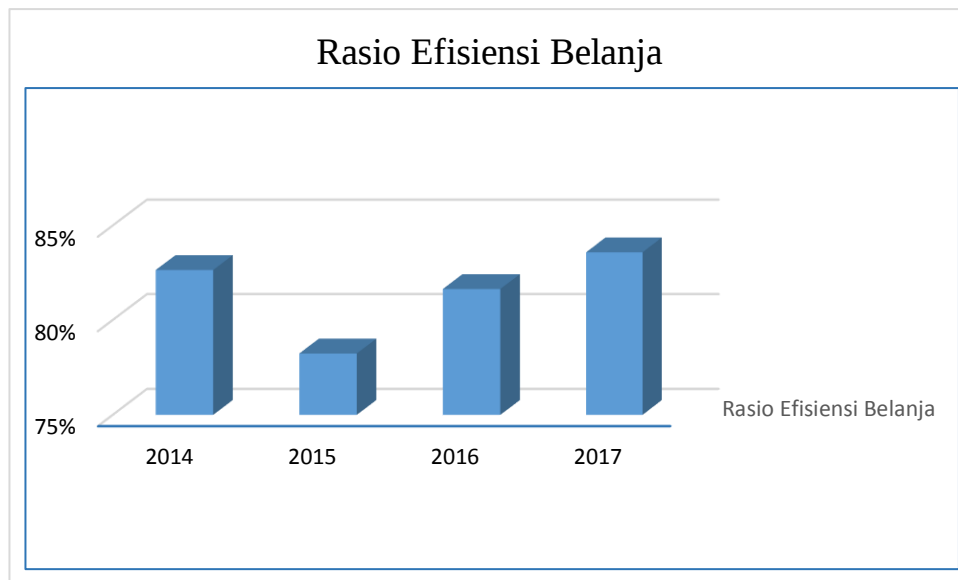
6) Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan hasil perhitungan dari data Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017, Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 (Dalam Rupiah)

TAHUN	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja
2014	1.655.060.222.422	2.002.563.832.687	83%
2015	1.732.185.946.665	2.214.058.203.050	78%
2016	1.708.801.717.141	2.093.038.375.774	82%
2017	1.957.966.285.066	2.342.516.240.778	84%
Rata-rata			82%

Sumber: Data Sekunder Diolah



Gambar 4.6 Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dan grafik, rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 sebesar 82%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dinilai telah melakukan efisiensi anggaran, dengan rasio kurang dari 100%.

4. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasinya masih kurang. Ini terlihat dari hasil rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Magelang tahun 2014-2017, berdasarkan pengolahan data yang berasal dari Ringkasan Laporan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 adalah sebesar 15%. Ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang kecil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Kemudian di lihat dari pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Kabupaten Magelang berada pada

kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Ini terlihat dari hasil rata-rata Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017, berdasarkan pengolahan data yang berasal dari Ringkasan Laporan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 adalah sebesar 20%. Ini menunjukkan bahwa, peran Pemerintah Pusat sangat dominan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang. Rasio Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2014-2017 rata-rata Belanja Operasi sebesar 80% dan Belanja Modal sebesar 20%.

- 2) Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Magelang terbilang sangat efektif dan efisien. Ini terlihat dari rata-rata Rasio Efektivitas P A D Kabupaten Magelang tahun 2014-2017, berdasarkan pengolahan data yang berasal dari Ringkasan Laporan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 adalah sebesar 110%. Ini menunjukkan bahwa, kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemudian dilihat dari hasil rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Magelang tahun 2014-2017, berdasarkan pengolahan data yang berasal dari Ringkasan Laporan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 adalah sebesar 82%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dinilai telah melakukan efisiensi anggaran, dengan rasio kurang dari 100%.

Saran

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang

Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah serta potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang, karena hal tersebut akan memiliki dampak yang besar bagi Pemerintah maupun masyarakat. Misalnya potensi tersebut berasal dari pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, perdagangan dan sektor lainnya yang dapat menghasilkan suatu pendapatan bagi pemerintah daerah.

- 2) Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, karena penelitian ini hanya mengambil satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Magelang. Serta terbatasnya periode tahun yang digunakan, yaitu hanya 4 tahun dari 2014-2017. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. “Statistik Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018”. <https://magelangkab.bps.go.id> (diakses 17 Mei 2019 pukul 9:39 WIB).
- Bisma, I Dewa Gde & Hery Susanto. (2010). “*Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007*”. *Jurnal. GaneÇ Swara* Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Mataram.
- Daling, Marchelino. 2013. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. (Jurnal EMBA Vol 1 No 3) Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Fidelius. 2013. *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado*. (Jurnal EMBA Vol 1 No 4) Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhibtari, Astriana Nabila. 2014. “*Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*”. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Olivia, Bella Julyanti. 2017. “*Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Bandung)*”. <https://repository.widyatama.ac.id>. (diakses 25 Agustus 2019 pukul 12:53 WIB).
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta*. STIE AMA Salatiga.
- Rahmatina, Aulia Zhufinsa Nur. 2011. “*Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009*”. *Skripsi*. Institut Manajemen Telkom Bandung.